



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

SINGKATAN NAMA JABATAN/SKPD DAN KODE JABATAN/KELEMBAGAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- b. bahwa untuk mempermudah mengingat dan memperlancar pelaksanaan administrasi pemerintahan maka diperlukan penyingkatan nama jabatan/satuan kerja perangkat daerah dan pengkodean jabatan/kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Singkatan Nama Jabatan/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengkodean Jabatan/Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 11);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-5775 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SINGKATAN NAMA JABATAN/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KODE JABATAN/KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
5. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Sibolga yang membantu tugas Walikota sesuai bidang keahliannya diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
9. Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sibolga;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Sibolga;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sibolga.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Sibolga terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam wilayah Kota Sibolga.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah Kecamatan di Kota Sibolga.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Singkatan Nama Jabatan/SKPD dan Kode Jabatan/Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan singkatan nama jabatan/SKPD dan kode jabatan/kelembagaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Singkatan Nama Jabatan/SKPD dan Kode Jabatan/Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga adalah :

1. untuk mempermudah mengingat dan berkomunikasi;
2. untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemerintahan.

BAB III SINGKATAN NAMA JABATAN/SKPD

Pasal 4

- (1) Penyingkatan nama jabatan/SKPD disusun sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia dan ketentuan yang berlaku serta kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi.
- (2) Penulisan singkatan nama jabatan/SKPD dalam pengelolaan tata naskah dinas, harus didahului dengan bentuk lengkapnya dan selanjutnya dapat dipergunakan singkatan saja.
- (3) Singkatan nama jabatan/SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KODEJABATAN/KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengkodean jabatan/kelembagaan disusun secara berjenjang berdasarkan eselonering dengan menggunakan prinsip perkembangan dari tingkatan teratas sampai terendah.
- (2) Kode terdiri dari huruf dan angka dengan pola yang teratur dan tetap.
- (3) Kode nama jabatan/kelembagaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 SINGKATAN NAMA JABATAN/ SKPD DAN
 KODE JABATAN/ KELEMBAGAAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SIBOLGA.

NAMA JABATAN/SKPD DAN SINGKATAN NAMA JABATAN/SKPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

A. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	NAMA JABATAN	SINGKATAN
1.	Walikota Sibolga	Wako Sibolga
2.	Wakil Walikota Sibolga	Wawako Sibolga

B. SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA

NAMASKPD	NAMA JABATAN PIMPINAN SKPD	SINGKATAN	
		NAMA SKPD	PIMPINAN SKPD
Sekretariat Daerah Kota	Sekretaris Daerah Kota	Setda Kota	SekdaKota

NO	NAMA JABATAN	SINGKATAN
1.	Asisten Pemerintahan	Asisten I
2.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Asisten II
3.	Asisten Administrasi Umum	Asisten III

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN PIMPINAN SKPD	SINGKATAN	
			NAMASKPD	PIMPINAN SKPD
1.	Bagian Pemerintahan	Kepala Bagian Pemerintahan	Bag. Pem	Kabag Pem
2.	Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum	Bag. Hukum	Kabag Hukum
3.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Bag. Humasy	Kabag Humasy
4.	Bagian Perekonomian Dan Ketahanan Pangan	Kepala Bagian Perekonomian Dan Ketahanan Pangan	Bag. Ekpang	Kabag Ekpang
5.	Bagian Pengendalian Pembangunan	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Bag. Dalbang	Kabag Dalbang
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	KabagKesra
7.	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Bag. Umum	Kabag Umum
8.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bag. Ortala	Kabag Ortala
9.	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Bag. Keupeg	Kabag Keupeg

C. SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA

NAMA SKPD	SEBUTAN PIMPINAN SKPD	SINGKATAN	
		NAMASKPD	PIMPINAN SKPD
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Setwan	Sekwan

D. DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA

NO	NAMASKPD	NAMA JABATAN PIMPINAN SKPD	SINGKATAN	
			NAMASKPD	PIMPINAN SKPD
1.	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kadis Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes	Kadiskes
3.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Budparpora	Kadis Budparpora
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindagkop UKM	Kadis Perindagkop UKM
5.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinsosnaker	Kadis Sosnaker
6.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	DKPP	Kadis KPP
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Hubkominfo	Kadis Hubkominfo
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	Kadis Dukcapil
9.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas LHKP	Kadis LHKP
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PU	Kadis PU
11.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas PKAD	Kadis PKAD

E. LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN PIMPINAN SKPD	SINGKATAN	
			NAMASKPD	PIMPINAN SKPD
1.	Inspektorat	Inspektur	Inspektorat	Inspektur
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Kepala Bappeda
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP	Kepala BKPP
4.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Badan KBPP	Kaban KBPP
5.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kantor PMK	Kakan PMK
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesbangpol	Kakan Kesbangpol
7.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan	Kakan Perpustakaan
8.	Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing	Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing	RSU F.L.Tobing	Dir. RSU F.L.Tobing
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Kasat Pol PP
10.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	KPPT	Kakan KPPT
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	Kalak BPBD

F. STAF AHLI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

NO	NAMA JABATAN	SINGKATAN
1.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bid. Pemhupolkemas SDM
2.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Staf Ahli Bid. PEK

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 SINGKATAN NAMA JABATAN/ SKPD DAN
 KODE JABATAN/ KELEMBAGAAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SIBOLGA.

KODE JABATAN/KELEMBAGAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

A. KODE JABATAN

Kode jabatan yang dimaksud disini adalah kode jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Staf Ahli yaitu sebagai berikut:

Nama Jabatan	Kode
1. Walikota	W1
2. Wakil Walikota	W2
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	SA1
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	SA2

B. KODE KELEMBAGAAN

Nomenklatur Kelembagaan	Kode
A. Sekretariat	A
1. Sekretariat Daerah Kota	A1
a. Asisten Pemerintahan	A1.1
1) Bagian Pemerintahan	A1.11
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum	A1.111
b) Sub Bagian Pertanahan, Kerjasama dan Perbatasan	A1.112
c) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	A1.113
2) Bagian Hukum	A1.12
a) Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan	A1.121
b) Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	A1.122
c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	A1.123
3) Bagian Humasy dan Protokoler	A1.13
a) Sub Bagian Protokoler	A1.131
b) Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan	A1.132
c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi	A1.133

b. Asisten & Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	A1.2
1) Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	A1.21
a) Sub Bagian Sarana Perekonomian, Produksi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam	A1.211
b) Sub Bagian Pengembangan Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah	A1.212
c) Sub Bagian Ketahanan Pangan	A1.213
2) Bagian Pengendalian Pembangunan	A1.22
a) Sub Bagian Pengendalian	A1.221
b) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi	A1.222
c) Sub Bagian Program	A1.223
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat	A1.23
a) Sub Bagian Pembinaan Umat Beragama dan Urusan Haji	A1.231
b) Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	A1.232
c) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan	A1.233
c. Asisten Administrasi Umum	A1.3
1) Bagian Umum dan Perlengkapan	A1.31
a) Sub Bagian Umum dan RumahTangga	A1.311
b) Sub Bagian Perlengkapan, Perawatan dan Pemeliharaan	A1.312
c) Sub Bagian Pengadaan	A1.313
2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana	A1.32
a) Sub Bagian Kelembagaan	A1.321
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan	A1.322
c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan	A1.323
3) Bagian Keuangan dan Kepegawaian	A1.33
a) Sub Bagian Anggaran Sekretariat	A1.331
b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat	A1.332
c) Sub Bagian Kepegawaian	A1.333
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A2
a. Bagian Umum	A2.1
1) Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian	A2.11
2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	A2.12
3) Seksi Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan	A2.13
b. Bagian Risalah dan Persidangan	A2.2
1) Sub Bagian Risalah	A2.21
2) Sub Bagian Persidangan	A2.22
3) Sub Bagian Legislasi Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan	A2.23
c. Bagian Keuangan	A2.3
1) Sub Bagian Akuntansi	A2.31
2) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi	A2.32

B. Dinas Daerah	B
1. Dinas Pendidikan	B1
a. Sekretariat	B1.1
1) Sub Bagian Umum	B1.11
2) Sub Bagian Program	B1.12
3) Sub Bagian Keuangan	B1.13
b. Bidang Pendidikan Dasar	B1.2
1) Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SD	B1.21
2) Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SMP	B1.22
3) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar	B1.23
c. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi	B1.3
1) Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SMA dan Perguruan Tinggi	B1.31
2) Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SMK	B1.32
3) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah	B1.33
d. Bidang Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	B1.4
1) Seksi Tenaga Pendidik	B1.41
2) Seksi Tenaga Kependidikan	B1.42
e. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Non Formal dan Informal	B1.43
1) Seksi Kebudayaan	B1.5
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	B1.51
3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan kemitraan	B1.52
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	B1.6
1) Sub Bagian Tata Usaha	B1.61
2. Dinas Kesehatan	B2
a. Sekretariat	B2.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B2.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B2.12
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	B2.13
b. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	B2.2
1) Seksi Surveyland Epidemiologi Imunisasi dan Kesehatan Matra	B2.21
2) Seksi Pengendalian Penyakit	B2.22
3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Krisis	B2.23
c. Bidang Pelayanan Kesehatan	B2.3
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	B2.31
2) Seksi Kesehatan Institusi dan Rujukan	B2.32
3) Seksi Perizinan dan Akreditasi	B2.33

d. Bidang Kesehatan Masyarakat	B2.4
1) Seksi Pebaikan Gizi Masyarakat	B2.41
2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana	B2.42
3) Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	B2.43
e. Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	B2.5
1) Seksi Pengelolaan Obat	B2.51
2) Seksi Alat Kesehatan dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga	B2.52
3) Seksi Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan, Minuman	B2.53
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B2.6
1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium	B2.61
a) Sub Bagian Tata Usaha	B2.611
2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pintu Angin	B2.62
a) Sub Bagian Tata Usaha	B2.621
3) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sambas	B2.63
a) Sub Bagian Tata Usaha	B2.631
4) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pelabuhan Sambas	B2.64
a) Sub Bagian Tata Usaha	B2.641
5) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Aek Habil	B2.65
a) Sub Bagian Tata Usaha	B2.651
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	B3.
a. Sekretariat	B3.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B3.11
2) Sub Bagian Keuangan Kepegawaian	B3.12
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	B3.13
b. Bidang Seni dan Budaya	B3.2
1) Seksi Pembinaan Kesenian	B3.21
2) Seksi Kelestarian dan Pengembangan Budaya	B3.22
3) Seksi Promosi Seni dan Budaya	B3.23
c. Bidang Pariwisata	B3.3
1) Seksi Pengembangan Pariwisata	B3.31
2) Seksi Perizinan	B3.32
3) Seksi Promosi Pariwisata	B3.33
d. Bidang Kepemudaan	B3.4
1) Seksi Bina Generasi Muda	B3.41
2) Seksi Produktivitas dan Kelembagaan Kepemudaan	B3.42
e. Bidang Olah Raga	B3.5
1) Seksi Pembinaan Olah Raga	B3.51
2) Seksi Olah Raga Masyarakat dan Prestasi	B3.52
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B3.6

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	B4
a. Sekretariat	B4.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B4.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B4.12
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	B4.13
b. Bidang Perindustrian	B4.2
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	B4.21
2) Seksi Usaha Perindustrian	B4.22
c. Bidang Perdagangan	B4.3
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	B4.31
2) Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi	B4.32
3) Seksi Pendaftaran, Informasi dan Pengawasan	B4.33
d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	B4.4
1) Seksi Kelembagaan dan Klasifikasi Koperasi	B4.41
2) Seksi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	B4.42
3) Seksi Kemitraan, Pemasaran, Simpan Pinjam dan Jaringan Usaha	B4.43
e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen	B4.5
1) Seksi Perlindungan Konsumen, Informasi dan Bimbingan Usaha	B4.51
2) Seksi Promosi dan Pemasaran	B4.52
3) Seksi Kejasama dan Pelayanan Penanaman Modal	B4.53
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B4.6
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sibolga Nauli	B4.61
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Inpres	B4.62
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	B5
a. Sekretariat	B5.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B5.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B5.12
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	B5.13
b. Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial	B5.2
1) Seksi Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia dan Fakir Miskin	B5.21
2) Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial	B5.22
c. Bidang Pelayanan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	B5.3
1) Seksi Pemberdayaan Rehabilitasi	B5.31
2) Seksi Pelayanan Sosial	B5.32

d. Bidang Bina Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan	B5.4
1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pahlawan, Perintis Kejuangan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	B5.41
2) Seksi Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat	B5.42
3) Seksi Penganugrahan Tanda Kehormatan dan Penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	B5.43
e. Bidang Ketenagakerjaan	B5.
1) Seksi Hubungan Industrial, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja	B5.51
2) Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas	B5.52
3) Seksi Ketrasmigrasian	B5.53
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B5.6
6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	B6
a. Sekretariat	B6.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B6.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B6.12
3) Sub Perencanaan dan Pelaporan	B6.13
b. Bidang Kelautan	B6.2
1) Seksi Pemberdayaan Pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil.	B6.21
2) Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi	B6.22
3) Seksi Penelitian, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan	B6.23
c. Bidang Perikanan Tangkap	B6.3
1) Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi	B6.31
2) Seksi Usaha Agro Bisnis dan Perizinan	B6.32
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian	B6.33
d. Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan	B6.4
1) Seksi Teknologi Pengolahan	B6.41
2) Seksi Pemasaran dan Permodalan	B6.42
3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Mutu	B6.43
e. Bidang Peternakan	B6.5
1) Seksi Pengembangan Peternakan	B6.51
2) Seksi Kesehatan Hewan Ternak	B6.52
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B6.6
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	B7
a. Sekretariat	B7.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B7.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B7.12
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	B7.13

b. Bidang Teknis dan Manajemen Lalu Lintas	B7.2
1) Seksi Teknis dan Pengujian	B7.21
2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	B7.22
c. Bidang Perhubungan Darat	B7.3
1) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan	B7.31
2) Seksi Angkutan	B7.32
3) Seksi Prasarana dan Teknis Sarana	B7.33
d. Bidang Perhubungan Laut	B7.4
1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	B7.41
2) Seksi Penjagaan Keselamatan dan Navigasi	B7.42
3) Seksi Perkapalan dan Kepelabuhan	B7.43
e. Bidang Komunikasi dan Informatika	B7.5
1) Seksi Pos dan Telekomunikasi	B7.51
2) Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi	B7.52
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B7.6
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal	B7.61
a) Sub Bagian Tata Usaha	B7.611
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran	B7.62
a) Sub Bagian Tata Usaha	B7.621
3) Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Elektronik	B7.63
a) Sub Bagian Tata Usaha	B7.631
4) Unit Pelaksana Teknis Terminal	B7.64
a) Sub Bagian Tata Usaha	B7.641
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B8
a. Sekretariat	B8.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	B8.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	B8.12
3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	B8.13
b. Bidang Kependudukan	B8.2
1) Seksi Fasilitas Kependudukan	B8.21
2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk	B8.22
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk	B8.23
c. Bidang Pencatatan Sipil	B8.3
1) Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil	B8.31
2) Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak dan Perubahan Kewarganegaraan	B8.32
3) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan/Pengesahan Anak	B8.33
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	B8.4
1) Seksi Operasional, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	B8.41
2) Seksi Pelayanan Informasi Data Kependudukan	B8.42
3) Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	B8.43
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah	B8.5

9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	B9
a. Sekretariat	B9.1
1) Sub Bagian Umum	B9.11
2) Sub Bagian Keuangan	B9.12
3) Sub Bagian Program	B9.13
b. Bidang Lingkungan Hidup	B9.2
1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	B9.21
2) Seksi Analisa Dampak Lingkungan Hidup	B9.22
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian	B9.23
c. Bidang Sarana dan Prasarana	B9.3
1) Seksi Peralatan dan Perlengkapan	B9.31
2) Seksi Angkutan dan Alat Berat	B9.32
3) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Tempat Pembuangan	B9.33
d. Bidang Kebersihan	B9.4
1) Seksi Kebersihan Jalan Umum dan Pemukiman	B9.41
2) Seksi Kebersihan Saluran, Sungai dan Pantai	B9.42
3) Seksi Pelayanan Masyarakat	B9.43
e. Bidang Pertamanan	B9.5
1) Seksi Taman dan Makam	B9.51
2) Seksi Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias	B9.52
3) Seksi Ruang Terbuka Hijau	B9.53
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B9.6
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah	B9.61
10. Dinas Pekerjaan Umum	B10
a. Sekretariat	B10.1
1) Sub Bagian Umum	B10.11
2) Sub Bagian Keuangan	B10.12
3) Sub Bagian Program	B10.13
b. Bidang Bina Marga	B10.2
1) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	B10.21
2) Seksi Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	B10.22
3) Seksi Alat Berat dan Perbengkelan	B10.23
c. Bidang Cipta Karya	B10.3
1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung-Gedung	B10.31
2) Seksi Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	B10.32
3) Seksi Pengawasan Tehnik Cipta Karya	B10.33
d. Bidang Penyehatan Lingkungan, Pemukiman dan Pertambangan	B10.4
1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Lingkungan Pemukiman	B10.41
2) Seksi Pengawasan Tehnik, Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	B10.42
3) Seksi Pertambangan dan Energi	B10.43

e. Bidang Perencanaan	B10.5
1) Seksi Analisis	B10.51
2) Seksi Survey dan Pengukuran	B10.52
3) Seksi Data dan Informasi	B10.53
f. Bidang Penataan Ruang	B10.6
1) Seksi Penataan Kota	B10.61
2) Seksi Kawasan Siap Bangun	B10.62
3) Seksi Pemukiman Kumuh	B10.63
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah	B10.7
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah (PAL)	B10.71
11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B11
a. Sekretariat	B11.1
1) Sub Bagian Umum	B11.11
2) Sub Bagian Keuangan	B11.12
3) Sub Bagian Program	B11.13
b. Bidang Pendapatan	B11.2
1) Seksi Pendataan Pendapatan Daerah	B11.21
2) Seksi Penetapan dan Penagihan	B11.22
3) Seksi Dana Perimbangan, Pajak Lain-Lain dan Evaluasi	B11.23
c. Bidang Penganggaran	B11.3
1) Seksi Penyusunan APBD	B11.31
2) Seksi Penganggaran I	B11.32
3) Seksi Penganggaran II	B11.33
d. Bidang Perbendaharaan	B11.4
1) Seksi Belanja Tidak Langsung	B11.41
2) Seksi Belanja Langsung	B11.42
3) Seksi Kas Daerah dan Investasi	B11.43
e. Bidang Akuntansi	B11.5
1) Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah	B11.51
2) Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah	B11.52
3) Seksi Pelaporan dan Pembinaan	B11.53
f. Bidang Aset	B11.6
1) Seksi Perencanaan Aset	B11.61
2) Seksi Penatausahaan Aset	B11.62
3) Seksi Pengendalian Aset	B11.63
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas	B11.7
C. Lembaga Teknis Daerah	C
1. Inspektorat	C1
a. Sekretariat	C1.1
1) Sub Bagian Perencanaan	C1.11
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	C1.12
3) Sub Bagian Administrasi dan Umum	C1.13

b. Inspektur Pembantu Wilayah I				C1.2
1) Seksi Pengawasan Pembangunan	Pemerintah	Bidang		C1.21
2) Seksi Pengawasan Pemerintahan	Pemerintah	Bidang		C1.22
3) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan	Pemerintah	Bidang		C1.23
c. Inspektur Pembantu Wilayah II				C1.3
1) Seksi Pengawasan Pembangunan	Pemerintah	Bidang		C1.31
2) Seksi Pengawasan Pemerintahan	Pemerintah	Bidang		C1.32
3) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan	Pemerintah	Bidang		C1.33
d. Inspektur Pembantu Wilayah III				C1.4
1) Seksi Pengawasan Pembangunan	Pemerintah	Bidang		C1.41
2) Seksi Pengawasan Pemerintahan	Pemerintah	Bidang		C1.42
3) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan	Pemerintah	Bidang		C1.43
e. Inspektur Pembantu Wilayah IV				C1.5
1) Seksi Pengawasan Pembangunan	Pemerintah	Bidang		C1.51
2) Seksi Pengawasan Pemerintahan	Pemerintah	Bidang		C1.52
3) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan	Pemerintah	Bidang		C1.53
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				C2
a. Sekretariat				C2.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan				C2.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan				C2.12
3) Sub Bagian Kepegawaian				C2.13
b. Bidang Pengembangan dan Penelitian				C2.2
1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan				C2.21
2) Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Statistik				C2.22
c. Bidang Pembangunan Ekonomi				C2.3
1) Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pertanian				C2.31
2) Sub Bidang Indagkop, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja				C2.32
d. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana				C2.4
1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup				C2.41
2) Sub Bidang Perhubungan, Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah				C2.42

e. Bidang Sosial Budaya	C2.5
1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	C2.51
2) Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Seni Budaya	C2.52
f. Unit Pelaksana Teknis Badan	C2.6
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	C3
a. Sekretariat	C3.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	C3.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	C3.12
3) Sub Bagian Kepegawaian	C3.13
b. Bidang Formasi, Pensiun dan Pembinaan	C3.2
1) Sub Bidang Kebutuhan Formasi dan Pensiun	C3.21
2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	C3.22
c. Bidang Pengembangan dan Mutasi	C3.3
1) Sub Bidang Pengembangan Mutasi Kepangkatan	C3.31
2) Sub Bidang Pengembangan Mutasi Jabatan	C3.32
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	C3.4
1) Sub Bidang Pendidikan Formal dan Diklat Struktural	C3.41
2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional	C3.42
e. Unit Pelaksana Teknis Badan	C3.5
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	C4
a. Sekretariat	C4.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	C4.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	C4.12
3) Sub Bagian Kepegawaian	C4.13
b. Bidang Data dan Informasi	C4.2
1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data	C4.21
2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyerbarluasan Informasi	C4.22
c. Bidang Keluarga Berencana	C4.3
1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi	C4.31
2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja	C4.32
d. Bidang Keluarga Sejahtera	C4.4
1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta	C4.41
2) Sub Bidang Advokasi dan KIE	C4.42
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan	C4.5
1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	C4.51
2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak	C4.52
f. Unit Pelaksana Teknis Badan	C4.6

5. Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing	C5
a. Wakil Direktur Pelayanan	C5.1
1) Bidang Keperawatan	C5.11
a) Seksi Pelayanan Askep dan Etika Keperawatan	C5.111
b) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Mutu Keperawatan	C5.112
2) Bidang Pelayanan	C5.12
a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	C5.121
b) Seksi Pengawasan, Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien	C5.122
3) Bidang SDM dan Peningkatan Mutu	C5.13
a) Seksi Diklat dan Litbang	C5.131
b) Seksi Peningkatan Mutu dan Kerjasama	C5.132
4) Kelompok Jabatan Fungsional	C5.14
5) Instalasi	C5.15
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan	C5.2
1) Bagian Kesekretariatan	C5.21
a) Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	C5.211
b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	C5.212
2) Bagian Rekam Medis dan Informasi	C5.22
a) Sub Bagian Rekam Medis, Informasi dan Laporan	C5.221
b) Sub Bagian Hukum, Pemasaran Sosial dan Perpustakaan	C5.222
3) Bagian Keuangan dan Perencanaan	C5.23
a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran	C5.231
b) Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi	C5.232
4) Kelompok Jabatan Fungsional	C5.24
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	C6
a. Sekretariat Unsur Pelaksana	C6.1
b. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pemadam Kebakaran	C6.2
c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	C6.3
d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	C6.4
e. Kelompok Jabatan Fungsional	C6.5
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	C7
a. Sub Bagian Tata Usaha	C7.1
b. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan	C7.2
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat	C7.3
d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan TTG, Sumber Daya Alam	C7.4

8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	C8
a. Sub Bagian Tata Usaha	C8.1
b. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	C8.2
c. Seksi Organisasi Masyarakat	C8.3
d. Seksi Sosial dan Politik	C8.4
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip	C9
a. Sub Bagian Tata Usaha	C9.1
b. Seksi Pengelolaan Keperpustakaan	C9.2
c. Seksi Pengelolaan Kearsipan	C9.3
d. Seksi Pelayanan	C9.4
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	C10
a. Sub Bagian Tata Usaha	C10.1
b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan	C10.2
c. Seksi Penataan dan Sosialisasi	C10.3
d. Seksi Pelayanan Pengaduan	C10.4
e. Tim Teknis	C10.5
11. Satuan Polisi Pamong Praja	C10.
a. Sub Bagian Tata Usaha	
b. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah	C10.1
c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	C10.2 C10.3
d. Seksi Pengembangan Kapasitas	C10.4
e. Seksi Perlindungan Masyarakat	C10.5
D. Kecamatan	D
1) Kecamatan Sibolga Utara	D1
a. Sekretariat	D1.2
1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan	D1.21
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	D11.22
b. Seksi Pemerintahan	D1.3
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	D1.4
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	D1.5
e. Seksi Kesejahteraan Sosial	D1.6
f. Seksi Pelayanan	D1.7
2) Kecamatan Sibolga Kota	D2.
a. Sekretariat	D2.1
1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan	D2.12
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	D2.13
b. Seksi Pemerintahan	D2.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	D2.3
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	D2.4
e. Seksi Kesejahteraan Sosial	D2.5
f. Seksi Pelayanan	D2.6

3) Kecamatan Sibolga Sambas	D3
a. Sekretariat	D3.1
1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan	D3.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	D3.12
b. Seksi Pemerintahan	D3.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	D3.3
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	D3.4
e. Seksi Kesejahteraan Sosial	D3.5
f. Seksi Pelayanan	D3.6
4) Kecamatan Sibolga Selatan	D4
a. Sekretariat	D4.1
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	D4.11
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	D4.12
b. Seksi Pemerintahan	D4.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	D4.3
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	D4.4
e. Seksi Kesejahteraan Sosial	D4.5
f. Seksi Pelayanan	D4.6
E. Kelurahan	E
1. Kelurahan Sibolga Ilir	E1
a. Sekretariat	E1.1
b. Seksi Pemerintahan	E1.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E1.3
d. Seksi Pembangunan	E1.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E1.5
2. Kelurahan Huta Tonga-Tonga	E2
a. Sekretariat	E2.1
b. Seksi Pemerintahan	E2.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E2.3
d. Seksi Pembangunan	E2.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E2.5
3. Kelurahan Angin Nauli	E3
a. Sekretariat	E3.1
b. Seksi Pemerintahan	E3.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E3.3
d. Seksi Pembangunan	E3.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E3.5
4. Kelurahan Huta Barangan	E4
a. Sekretariat	E4.1
b. Seksi Pemerintahan	E4.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E4.3
d. Seksi Pembangunan	E4.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E4.5
5. Kelurahan Simare-Mare	E5
a. Sekretariat	E5.1
b. Seksi Pemerintahan	E5.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E5.3
d. Seksi Pembangunan	E5.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E5.5

6. Kelurahan Kota Baringin	E6
a. Sekretariat	E6.1
b. Seksi Pemerintahan	E6.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E6.3
d. Seksi Pembangunan	E6.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E6.5
7. Kelurahan Pasar Baru	E7
a. Sekretariat	E7.1
b. Seksi Pemerintahan	E7.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E7.3
d. SeksiPembangunan	E7.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E7.5
8. Kelurahan Pasar Belakang	E8
a. Sekretariat	E8.1
b. Seksi Pemerintahan	E8.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E8.3
d. SeksiPembangunan	E8.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E8.5
9. Kelurahan Pancuran Gerobak	E9
a. Sekretariat	E9.1
b. Seksi Pemerintahan	E9.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E9.3
d. Seksi Pembangunan	E9.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E9.5
10. Kelurahan Pancuran Dewa	E10
a. Sekretariat	E10.1
b. Seksi Pemerintahan	E10.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E10.3
d. Seksi Pembangunan	E10.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E10.5
11. Kelurahan Pancuran Bambu	E11
a. Sekretariat	E11.1
b. Seksi Pemerintahan	E11.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E11.3
d. Seksi Pembangunan	E11.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E11.5
12. Kelurahan Kerambil	E12
a. Sekretariat	E12.1
b. Seksi Pemerintahan	E12.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E12.3
d. SeksiPembangunan	E12.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E12.5
13. Kelurahan Pancuran Pinang	E13
a. Sekretariat	E13.1
b. Seksi Pemerintahan	E13.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E13.3
d. Seksi Pembangunan	E13.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E13.5

14. Kelurahan Aek Habil	E14.
a. Sekretariat	E14.1
b. Seksi Pemerintahan	E14.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E14.3
d. Seksi Pembangunan	E14.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E14.5
15. Kelurahan Aek Manis	E15
a. Sekretariat	E15.1
b. Seksi Pemerintahan	E15.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E15.3
d. Seksi Pembangunan	E15.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E15.5
16. Kelurahan Aek Parombunan	E16
a. Sekretariat	E16.1
b. Seksi Pemerintahan	E16.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E16.3
d. Seksi Pembangunan	E16.4
e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E16.5
17. Kelurahan Aek Muara Pinang	E17
a. Sekretariat	E17.1
b. Seksi Pemerintahan	E17.2
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	E17.3
d. Seksi Pembangunan	E17.4
Seksi Kesejahteraan Masyarakat	E17.5

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN